

BAB II

ISU PELECEHAN AGAMA: PERTARUNGAN WACANA GLOBAL DAN WACANA LOKAL

Isu mengenai globalisasi kontemporer menjadi salah satu yang utama dalam kajian studi Hubungan Internasional (HI). Arus globalisasi kontemporer yang terjadi membawa perubahan pada kerangka kerja organisasi pemerintahan di dunia. Dengan adanya globalisasi terutama *supraterritoriality* menggeser tradisionalisme cara kerja pemerintahan. Sebelumnya territorialisme sangat erat hubungannya dengan mode regulasi ruang sosial-politik. Dengan berkembangnya globalisasi masyarakat didorong untuk masuk dalam regulasi dengan gaya polisentris (Scholte, 2004). Polisentris merupakan perspektif, yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep kebijakan global, yang lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak pusat pengambilan keputusan, yang masing-masing beroperasi dengan tingkat otonomi tertentu. Dalam konsep ini unit lokal, negara bagian, nasional dan juga termasuk unit tata kelola tujuan khusus yang melintasi yurisdiksi ikut andil dalam pembuatan keputusan pemerintah. Maksud dari konsep polisentris ini ingin mencapai keseimbangan tata kelola dari yang terpusat menuju desentralisasi atau berbasis masyarakat (Carlisle & Gruby, 2017). Konsep ini kemudian mengglobal karena adanya peningkatan aktivitas manusia yang makin saling terkait di tingkat nasional dan global karena perubahan teknologi dalam sistem tata kelola, dan pertumbuhan pasar modal. Dari sini kemudian sektor keilmuan “membentuk” pemahaman umum tentang konsep ini dan membantu para praktisi memperkenalkan dan memanfaatkan potensi sistem pemerintahan polisentris sehingga harus menjadi prioritas (Carlisle & Gruby, 2017).

Dengan konsep polisentris ini membentuk struktur pemerintahan baru yaitu *suprastate*. Pemerintahan nasional kemudian harus melibatkan *suprastate* dalam regulasi-regulasi negaranya. *Suprastate* merupakan rezim yang melibatkan

regional dan *transworld* yang beroperasi dengan beberapa otonomi dari negara. Bahkan banyak pemerintah *substate* (kota dan provinsi) terlibat langsung dengan bidang di luar negara mereka (Scholte, 2004). Dengan adanya *suprastate* yang melibatkan seluruh sektor global, terbentuklah masyarakat sipil global yang terikat oleh norma tertentu yang dikatakan sebagai etika global.

Munculnya globalisasi memunculkan pakar-pakar baru yang berusaha untuk menteorikan globalisasi salah satunya Arjun Appadurai. Appadurai mengemukakan bahwa teori global miliknya sedikit berbeda dengan milik pemikir lainnya. Inti gagasan globalisasinya ada pada *the idea of rupture* atau perpecahan yang diilhami oleh proses ikutnya media, migrasi, dan hubungannya dengan "*the work of imagination*". Appadurai menekankan media massa, khususnya elektronik, sebagai inti dari *the idea of rupture* ini karena caranya memotivasi kerja imajinasi pada level individu. Media massa memungkinkan individu untuk berimajinasi sendiri dalam dunia imajinasi yang juga ditempati oleh orang lain dalam situasi yang sama. Appadurai menekankan bahwa media elektronik bukan hanya "*a monocausal fetishization of the electronic*". Tapi merupakan hubungan antara media dan migrasi yang memiliki arti/ maksud. Media dan migrasi membuat produksi subjektivitas tradisional tidak stabil dengan menciptakan ruang publik diasporik baru, sehingga pada akhirnya merusak kekuatan negara-bangsa untuk menentukan perubahan sosial (Lau, 1999).

Dalam mengajukan gagasan-gagasan globalisasi Appadurai membebaskan dirinya dari homegenisasi teori yang cenderung memposisikan Amerika sebagai induk atau eksportir ideologi pada satu sistem global, dan tentang homegenisasi budaya. Bagi Appadurai Amerika hanyalah sebuah titik dari kompleksitas gambaran imajiner konstruksi transnasional. Dalam gagasannya tentang globalisasi ia mengajukan *transnational imaginary landscape* yang menggambarkan

perpecahan dan gap yang terjadi dalam proses arus budaya global. *Landscapes* tersebut adalah *etnoscapes*, *technoscape*, *financescape*, *mediascapes*, dan *ideoscapes*. Melalui lima lanskap ini Appadurai berupaya untuk memetakan jalan global kontemporer dalam semua jurang pemisahannya (Lau, 1999).

Lanskap *etnoscapes* menunjuk gerakan yang lebih nyata dimana orang-orang merubah bentuk dunia tempat kita hidup. Orang-orang tersebut termasuk turis, imigran, dan orang buangan. *Technoscape* merupakan fakta bahwa teknologi bergerak dengan cepat di berbagai jenis batas yang sebelumnya tidak dapat ditembus. Jarak fisik yang memisahkan negara, atau sumber daya alam suatu daerah kini sudah terlampaui dengan teknologi. Dengan *technoscape* juga menyeret keuangan untuk ikut mengglobal. *Financescape* mendeskripsikan global moneter dan pergerakan uang melalui bursa saham, dan modal lainnya dengan skala yang jauh lebih besar dari lingkup negara (Valentine, 2015).

Ketiga *scape* tersebut oleh Appadurai dikatakan sebagai lanskap yang nyata secara fisik. Sedangkan dua lainnya media dan idea ada pada lanskap imajiner/ pikiran. Appadurai mengatakan bahwa *mediascapes* mengacu pada distribusi kemampuan elektronik untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi dan gambaran dunia yang diciptakan oleh media-media tersebut. Sedangkan *ideoscapes* merupakan lanskap yang paling abstrak dari konsepsi arus global milik Appadurai. Secara umum *ideoscape* bersifat sangat politis. Hal ini dikarenakan *ideoscapes* berkaitan dengan ideologi negara dan kontra-ideologi yang secara eksplisit berorientasi pada upaya perebutan kekuasaan negara atau sebagiannya. Inti *ideoscapes* global kontemporer dikatakan berasal dari pandangan *Enlightment World* yang yaitu unsur-unsur seperti kebebasan, kesejahteraan, hak, kedaulatan, dan demokrasi (Valentine, 2015).

Unsur-unsur tersebut berasal dari negara-negara Eropa diawali dengan keinginan untuk “lepas” dari sistem monarki. Ide dari unsur-unsur tersebut berakar dari akal atau pikiran sebagai inti otoritas dan legitimasi. Sehingga kebebasan, toleransi, pemerintahan konstitusional, dan pemisahan gereja dan negara, merupakan cita-cita negara-negara di Eropa pada era *Enlightment*. Gagasan-gagasan ini yang kemudian disebarkan kepada negara-negara yang belum sejalan dengan mereka. Sayangnya masuknya globalisasi ke negara-negara lain tidak melulu mulus tanpa masalah. Banyak benturan yang terjadi antara global dengan lokal negara yang dituju. Tidak terkecuali pada sektor gagasan/ wacana atau yang bisa disebut norma. Benturan antara gagasan global dan domestik sering terjadi pada isu-isu yang berkaitan dengan agama. Bahkan pada *Enlightment Era* akar gagasan globalis muncul juga karena keinginan untuk gereja tidak lagi ikut campur dalam urusan publik.

Negara Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari arus globalisasi begitu juga dengan semua akibat dari gelombang ini. 2017 merupakan titik dimana masyarakat baik Indonesia dan dunia diajak untuk berfikir kembali apakah globalisasi ini memang baik dan bisa ditunjukkan untuk seluruh negara atau tidak. Pada September 2017 terjadi kasus yang menggerakkan ribuan masyarakat baik Indonesia maupun dunia, yaitu kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok. Jika dilihat dari apa yang disampaikan Appadurai maka kasus ini bergerak pada lanskap imajiner dengan keterlibatan media, gagasan global, dan gagasan tertentu dari domestik. Bab ini memaparkan lebih detail mengenai gagasan global dan lokal serta bagaimana mereka menempatkan diri pada kasus pelecehan agama tersebut.

A. Munculnya Kasus Pelecehan Agama oleh Ahok

Pada penelitian ini untuk mengerti bagaimana kasus ini bekerja pada lanskap imajiner kita perlu mengetahui bagaimana isu ini terjadi, bagaimana masing-masing

kubu menempatkan diri mereka dalam masalah ini, dan apa respon dari masing-masing kubu. Sebenarnya banyak kasus di Indonesia yang membuktikan bahwa ada perdebatan dua gagasan tersebut. Namun penelitian ini menggunakan kasus Ahok karena keterlibatan langsung aktor pemerintahan, kelompok masyarakat, dan *international society* dalam satu waktu. Selain itu kasus ini mendapatkan perhatian dan respon yang jauh lebih besar dibanding kasus-kasus lain yang pernah ada.

Munculnya kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok diawali dalam kunjungan kerja yang ia lakukan di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, yang kemudian ia memberikan pidato. Dalam pidatonya ia menyinggung isi dari kitab umat Islam. Protes kepada apa yang diucapkan Ahok tidak langsung muncul setelah ia memberikan pidato maupun setelah kunjungan kerja selesai. Ada gap dari saat Ahok berpidato hingga munculnya gelombang protes kepada Ahok. Diawali oleh rekam video yang di unggah Buni Yani pada 06 Oktober 2016 di laman Facebook dimana video yang diunggah oleh Buni ternyata hasil suntingan.

Video yang diunggah oleh Buni Yani di Facebook dengan judul “Penistaan Terhadap Agama?” merupakan hasil suntingan dengan menghilangkan beberapa bagian dan yang paling penting adalah penghilangan kata “pake” (baca: pakai) dari kalimat asli yang diucapkan Ahok. Sehingga makna dari kalimat berubah (Malau, 2017). Dalam video rekaman pidato selama 21.32 menit milik saluran Berita Terbaru yang diunggah di YouTube, kalimat yang dimaksud menistakan Islam ada dalam menit ke 19.58-20.09. Ahok mengatakan, “...jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya karena dibohongi pake Surat Al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu...”

(Terbaru, 2016). Setelah Buni Yani mengunggah video sesuai versinya masalah ini menjadi sangat viral dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak (Malau, 2017).

Seperti yang sudah disebutkan bahwa sebenarnya ada kasus lain yang mampu menjadi bukti perdebatan dua gagasan. Namun kasus-kasus tersebut tidak mendapat tanggapan yang cukup berarti. Kasus pelecehan agama oleh Ahok bukan satu-satunya yang terjadi. Banyak kasus pelecehan agama yang tidak terjangkau oleh media masa sehingga tidak mendapatkan perhatian yang besar, atau di wartakan namun tidak mendapatkan tanggapan sebesar kasus Ahok. Oleh karena itu timbul pertanyaan mengapa Ahok mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang lain yang juga melakukan pelecehan agama. Sebut saja kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh seorang dosen di salah perguruan tinggi Sumatra Barat dengan menginjak Al-Qur`an, kemudian juga menginjak Al-Qur`an oleh pemuda di Tulungagung, Jawa Timur. Jika alasan tidak *boomingnya* kedua masalah tersebut dikarenakan mereka bukan dari kalangan politisi, maka bagaimana dengan pelecehan agama Islam yang dilakukan oleh Megawati dan Sukmawati?

Pada 24 Januari 2017 Megawati Soekarnoputri dilaporkan ke pihak berwajib beberapa hari sebelumnya memberikan pidato dalam peringatan ulang tahun PDIP yang isinya dianggap menghina umat Islam. Ia dilaporkan oleh LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama karena ia menyampaikan;

“Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup memosisikan diri mereka sebagai pembawa 'self fulfilling prophecy', para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam

kehidupan setelah dunia fana, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya.”

Isi pidato ini dianggap melecehkan Islam karena dalam Islam jelas telah dijelaskan akan adanya hari akhir dan bagaimana kehidupan setelahnya (Tempo.co, 2017). Namun begitu pelecehan agama ini tidak ditindak lanjuti dengan serius, Megawati mendapatkan kecaman dan teguran tidak langsung dari beberapa pihak.

Kemudian pada tahun 2018 pelecehan agama Islam juga kembali terjadi yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri melalui puisi buatannya yang disampaikan di Jakarta dalam acara *Indonesia Fashion Week*. Sukmawati dianggap menyinggung syariat Islam, cadar, dan adzan dengan syair puisi “*sari konde sangat indah lebih cantik dari cadar dirimu*” dan “*suara kidung ibu Indonesia lebih merdu dari alunan adzan*” (Zulkarnain, 2018). Kasus berakhir dengan permohonan maaf dari Sukmawati dan tidak lagi jadi suatu masalah. Kasus ini dikatakan lebih baik untuk diselesaikan tanpa diperpanjang karena akan mengganggu tertib sosial karena menyangkut kebebasan karya seni seseorang (Aziz, 2018). Melihat bagaimana banyaknya kasus pelecehan agama yang terjadi namun tidak ditanggapi sebesar kasus Ahok menimbulkan pertanyaan apakah kasus ini murni pembelaan atas nama agama, atau terdapat motif-motif lain dibelakangnya.

B. Bentrok Gagasan dalam Proses Globalisasi di Indonesia

Globalisasi bukanlah isu baru dalam kajian studi sosial dan politik. Penyebaran agama Kristen dan agama lainnya, kemudian Islam pada zaman kenabian. Masa kolonisasi dan imperial juga merupakan bukti bahwa globalisasi terjadi jauh sebelum internet berkembang. Namun memang secara signifikan globalisasi

kontemporer lah yang mampu benar-benar menggeser tatanan dunia tradisional. Globalisasi kontemporer ini terjadi setelah Revolusi Industri. Perubahan dramatis terjadi pada masa tersebut sehingga modernitas bergerak sangat cepat. Ini didukung oleh perkembangan dari pergerakan orang, media, teknologi, modal, dan ideologi yang makin cepat (Lau, 1999).

Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor gagasan/ ide merupakan sektor penting yang juga mendukung penyebaran “globalisasi”. Pada arus globalisasi sebelum Revolusi Industri penyebaran suatu agama dilakukan dengan berbagai jalan seperti dakwah, berdagang, maupun khotbah-khotbah, atau bujukan/ ajakan mengikuti kepercayaan mereka oleh aktor-aktor yang “terpilih” oleh kepercayaan/ agama tersebut. Sedangkan penyebaran ideologi dan sistem pemerintahan pada saat itu dilakukan dengan jalan menaklukkan wilayah-wilayah lain dengan jalan perang, penjajahan, maupun koalisi. Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman merupakan negara-negara dari Eropa terkuat pada masanya. Mereka mampu melakukan ekspedisi ke belahan dunia lainnya dengan tujuan menguasai wilayah tersebut. Selain penguasaan secara fisik, mereka juga menguasai cara berpikir penduduk wilayah-wilayah yang mereka datangi. Sebut saja Indonesia-Malaysia-Singapura, ketiga negara ini awalnya merupakan satu peranakan dengan sistem pemerintahan kerajaan dan kesultanan. Datangnya bangsa Eropa dan melakukan penguasaan di wilayah ini pada akhirnya menjadikan wilayah ini demokrasi sesuai dengan apa yang mereka miliki. Setelah penguasaan tersebut gagasan mengenai kebebasan, kesejahteraan individu, hak individu, kedaulatan, dan demokrasi berkembang pesat di wilayah tersebut.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi penyebaran wacana global seperti kebebasan, kesejahteraan, hak, kedaulatan, dan demokrasi makin meluas dan tanpa kekerasan layaknya masa imperial dan kolonial. Penyebaran gagasan global makin baik dengan adanya internet, kemudahan untuk mengakses informasi mempercepat penyebarannya. Pada globalisasi kontemporer lebih memanfaatkan jaringan media masa. Media massa memainkan peran penting mereka memfasilitasi pertukaran budaya, mengalirkan informasi dan *image/* citra antar negara melalui siaran berita internasional, program televisi, teknologi baru, film dan musik (Matos, 2012).

Media benar-benar memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat. Sebut saja kantor-kantor berita internasional seperti *Reuters*, *Associated Press*, *United Press International*, dan *Agence France Presse* yang telah “diberi peran” untuk berkontribusi dalam menyebarkan agenda global dan dalam menciptakan persepsi khusus tentang Dunia Selatan sebagai tempat “korupsi, kudeta, dan bencana” bagi audiens Dunia Barat. David Held mengatakan bahwa media komunikasi global memfasilitasi munculnya budaya kosmopolitanisme. *Image* yang disediakan oleh media mendorong orang-orang di berbagai belahan dunia memahami tentang perbedaan dan merangsang orientasi kosmopolitan, pembentukan masyarakat sipil global, ruang publik global atau komunitas internasional. Meskipun belum sampai pada benar-benar menghancurkan “lokalitas” proses ini terus berlanjut. Para pemegang kendali media terus melakukan perubahan, mengadaptasi produk dan pemrograman konten mereka agar sesuai dengan selera dan identitas lokal (Matos, 2012). Proses ini tidak akan

pernah berhenti sampai benar-benar tercapai apa yang “mereka” inginkan.

Hal ini juga berlaku pada kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok pada 2017 silam. Masing-masing aktor dalam perdebatan gagasan global dan domestik di Indonesia berusaha untuk mempertahankan gagasan mana yang benar. Masing-masing gagasan memanfaatkan media masa untuk “mengumpulkan pendukung”. Gagasan global yang juga disebut universalisme tentu menawarkan adanya etika universal yang harus dilaksanakan oleh semua umat manusia. Ini karena kita semua dianggap merupakan masyarakat dunia, bukan milik daerah atau golongan tertentu. Etika global merupakan moral/ perilaku yang berlaku secara universal, dimana memandang orang tanpa memperhitungkan budaya, ras, seks, agama, kebangsaan, orientasi seks, atau faktor pembeda lainnya (Zalta, 2008). Kemudian dari sini muncul gagasan lainnya bahwa dalam suatu kelembagaan semua orang harus terwakili dalam menjalankan urusan dunia dan bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Oleh karena itu muncul demokrasi dan globalisasi, mereka menganggap bahwa kelembagaan yang demokratis sebagai ideal universal. Ketika suatu lembaga menganut sistem demokrasi maka oleh para penganut universalisme lembaga tersebut dikatakan “harus” mengaplikasikan gagasan-gagasan universalisme lainnya seperti non-diskriminasi, hak asasi, kebebasan berpendapat, dan wacana-wacana lainnya.

Sebagai salah satu negara demokrasi, Indonesia dituntut oleh *international society* untuk menerapkan nilai-nilai dari gagasan global pada kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok pada 2017. Bahkan tuntutan ini juga muncul dari sebagian masyarakat Indonesia, beberapa lembaga non-pemerintah di

Indonesia juga memberikan dukungannya pada Ahok. Berbagai jenis dukungan diberikan kepada Ahok mulai dari dukungan moral melalui tulisan di media sosial, aksi damai, hingga pengawalan proses peradilan oleh advokat-advokat pendukung Ahok (Saragih, 2017).

Artis dalam dan luar negeri, jurnalis terkemuka, serta pengamat politik internasional, juga melakukan kritik terhadap putusan hukum terhadap Ahok melalui media sosial dan tulisan-tulisan di surat kabar atau media berita lainnya. Bahkan beberapa outlet media internasional menjadikan putusan hakim terhadap Ahok sebagai berita utama mereka (Saragih, 2017). Surat kabar internasional baik cetak maupun elektronik terus mengikuti perkembangan kasus Ahok. CNNInternasional, NewYorkTimes (NYT), TheGuardian, BBCInternasional, VOAInternasional, berita utama surat kabar mereka adalah kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok.

Pada 13 Desember 2016 CNN mengunggah berita dengan judul *Jakarta Governor Ahok Found Guilty in Landmark Indonesian Blasphemy Trial* yang ditulis oleh Ben Westcott⁶. Dari berita tersebut bisa disimpulkan bahwa kasus penuntutan kepada Ahok merupakan kebangkitan konservatisme agama Islam di Indonesia dan juga kemunduran teloransi beragama (Westcott, 2017). Selain CNN, TheGuardian juga memberitakan kasus Ahok dengan sudut pandang yang mirip. Pada berita yang berjudul *Jakarta Protests: Muslims Turn Out in Force Against Christian Governor Ahok*, menjelaskan bahwa Ahok merupakan korban *double minority* dimana dia merupakan Tionghoa-Kristen dan kasus ini merupakan cara agar ia tidak dipilih dalam pemilihan

⁶ Digital News Producer, CNN International.

gubernur periode selanjutnya. Pada bulan yang sama dengan *The Guardian*, *The New York Times* juga mengeluarkan jejak beritanya dengan judul '*Rot at the Core*': *Blasphemy Verdict in Indonesia Dismays Legal Experts*. Mereka mengangkat isu pelecehan agama ini bukan lagi hanya mengenai pembelaan agama dan ketuhanan melainkan dengan pendekatan politik. Dalam berita yang ditulis oleh Joe Cochrane⁷ ini dapat disimpulkan bahwa ditahannya Ahok karena pelecehan agama merupakan cara musuh politik Ahok untuk menggagalkan ia menjabat lagi sebagai Gubernur Jakarta (Cochrane, 2017).

Bagaimana dunia internasional mengangkat isu ini bukan hanya melalui media baca, namun juga banyak yang melakukan aksi damai dan orasi. Seperti aksi damai yang dilakukan masyarakat internasional dari Atlanta, Georgia, dan Washington DC. WNI dan warga setempat di San Francisco, Seattle, New York City, Manhattan, Los Angeles, dan Dallas juga ikut memberikan dukungan untuk Ahok juga dengan melakukan aksi damai (Samosir, 2017).

C. **Counter Wacana Global oleh Konservatis Islam**

Jauh sebelum Indonesia ada, tanah ini dipimpin dengan sistem kerajaan, kemudian setelah masa penguasaan asing menjadi demokrasi. Sayangnya beberapa saat kemudian demokrasi yang dianggarkan

⁷ reporter *The New York Times* di Indonesia, *co-winner* dari Society of Publishers 2016 di Asia Awards untuk Editorial Excellence, telah meliput Indonesia dan Asia Tenggara selama 21 tahun untuk publikasi terkemuka termasuk *Newsweek*, *The Economist* dan *The Wall Street Journal Asia*, mantan koresponden perang yang melakukan beberapa laporan tur di Irak, Afghanistan dan Pakistan, pendiri *Jakarta Globe* dan *Strategic Review: The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs*.

seperti negara Barat tidak terimplementasikan dengan baik pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru arena perpolitikan Indonesia dikuasai oleh sistem oligarki. Namun sistem oligarki mulai bergeser saat Orde Baru runtuh dan masuk pada masa Reformasi. Meski begitu, pergeseran ini hanya berarti pada munculnya elite baru dalam perpolitikan Indonesia, dan juga perubahan pola hubungan klientelistiknya⁸ (Hiariej, 2018). Pergeseran ini tentu akibat dari arus globalisasi yang membawa liberalisasi di Indonesia yang bukan hanya menyentuh sektor ekonomi namun juga politiknya.

Liberalisasi politik di Indonesia memberikan dampak baik positif maupun negatif. Berbicara dampak positif, dengan liberalisasi politik mampu mendorong lebih banyak aktor yang terlibat dalam catur politik Indonesia. Namun dengan begitu berdampak pada munculnya persaingan ketat perebutan jabatan pemerintahan. Dengan semakin luas jangkauan *background* aktor yang terlibat maka makin banyak hal yang dapat dilibatkan dalam perebutan jabatan dipemerintahan (Jones, 2007). Dalam kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok, beberapa kritikus menganggap kasus ini merupakan tantangan dan kesempatan liberalisasi politik di Indonesia meskipun kasus ini dapat diartikan menjadi dua hal (Sulaiman, 2017). Apakah merupakan akibat dari liberalisasi politik Indonesia yang sudah ada, atau merupakan jalan untuk liberalisasi politik masuk lebih dalam di Indonesia. Dari sini kemudian muncul gagasan yang menginginkan utuk

⁸ pertukaran barang dan jasa untuk dukungan politik, sering melibatkan *quid-pro-quo* (kompensasi) implisit atau eksplisit. Klientelistik melibatkan hubungan asimetris antara kelompok aktor politik yang digambarkan sebagai patron, broker, dan klien.

apa yang sudah ada untuk tetap kukuh, lestari, tidak terganti. Ini yang kemudian kita ketahui dengan konservatisme.

Beberapa pakar mengantakan bahwa konservatisme muncul sebagai *counter* dari gagasan perubahan lainnya. Namun pakar lainnya beranggapan bahwa sebenarnya konservatisme dululah yang ada kemudian baru liberal-globalis muncul untuk meng-*counter* konservatis. Terlepas dari itu intinya kedua gagasan cukup bertolak belakang sehingga sering terjadi bentrok gagasan dalam kasus-kasus tertentu. pada kasus pelecehan agama yang dilakukan Ahok kaum konservatis agama muncul untuk menuntut “keadilan” bagi mereka.

Penuntutan kepada Ahok oleh kubu konservatis muncul setelah video rekaman pidato Ahok versi Buni Yani *viral* di Indonesia bahkan hingga luar negeri, sampai menimbulkan kisruh dalam masyarakat. Hingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan (MUISS) pada tanggal 06 Oktober 2016 melaporkan Ahok ke pihak berwenang atas dugaan penistaan agama (Artharini, 2016). Laporan tidak hanya datang dari MUISS namun juga dari Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI), Habib Novel Chaidir Hasan. Isu terus di *blow up* hingga muncul kelompok Advokat Cinta Tanah Air yang ikut melaporkan Ahok ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta karena dianggap tidak kompeten. Meskipun sudah dilaporkan pada 14 Oktober 2016 rakyat melakukan Aksi Bela Islam (ABI) I yang menuntut agar penyelidikan atas kasus penistaan agama oleh Ahok segera dilakukan. Aksi ini diprakarsai oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (Malau, 2017).

Karena merasa tidak ada tanggapan serius dari pihak aparat, masyarakat kemudian menggelar ABI II pada 04 November 2016. Aksi ini masih dipimpin oleh Habib

Rizieq Syihab juga didukung oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah, serta musisi Ahmad Dhani Prasetyo. Aksi yang diharapkan damai ini berakhir ricuh bahkan tidak hanya di lokasi demo namun di sejumlah wilayah di ibu kota lainnya. Hasil dari demo ini selain beberapa orang ditahan karena dianggap sebagai dalang dari kericuhan, namun juga proses gelar perkara Ahok oleh polisi dilakukan secara terbuka, namun terbatas. Sehingga rakyat bisa ikut mengawasi proses hukum yang berlangsung (Malau, 2017).

Pada 16 November 2016 Ahok dinyatakan sebagai tersangka, dan sidang pertama Ahok atas kasus dugaan penistaan agama digelar pada Selasa, 13 November 2016. Meski proses hukum sudah berlangsung namun aksi bela Islam masih terus berlanjut. 02 Desember 2016 ABI III digelar dengan agenda utama aksi ini adalah ibadah *shalat* Jumat bersma. Aksi ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi aksi dengan massa terbesar dengan perkiraan sekitar 3 juta orang yang ikuti. Dalam aksi ini beberapa tokoh ditangkap karena dugaan akan melakukan makar terhadap Presiden Joko Widodo pada aksi berikutnya. Proses persidangan terus berlanjut dengan baik namun ABI tetap dilakukan dengan maksud untuk mengawal jalannya persidangan. Aksi ini dilakukan pada 11 Februari 2017, dikoordinasi oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) (Malau, 2017).

Tanggal 21 Februari 2017 ABI kembali dilakukan dan digagas oleh Forum Umat Islam (FUI). Aksi ABI masih terus berlanjut hingga pada 31 Maret 2017, ABI VI dilaksanakan. Aksi ini diisi dengan kegiatan *long march* dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka. Agenda aksi adalah untuk meminta pemberhentian Ahok

dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebelum sidang putusan dilaksanakan, ABI lanjutan kembali dilakukan dengan pada 05 Mei 2017. Aksi ini mendukung pengadilan untuk memberikan vonis secara adil atas kasus penistaan agama yang menjerat Ahok. Akhirnya pada sidang putusan yang dilaksanakan pada 09 Mei 2017 Ahok dijatuhi hukuman dua tahun penjara terhitung sejak tanggal tersebut. Ahok terbukti melakukan tindakan penodaan agama secara sah dan meyakinkan (Malau, 2017).

Sikap yang diambil oleh FPI dan pendukungnya kemudian dianggap sebagai sikap yang konservatis. Hal ini disimpulkan setelah FPI selalu menolak untuk dianggap sebagai gerakan radikal ataupun teroris, mereka hanya ingin membantu pemerintah melawan dosa dan kejahatan. Meski begitu mereka mengaku sebagai "*reformed gangster*" (Woodward, et al., 2014). Selain itu, anggapan bahwa FPI dan pendukungnya merupakan konservatis karena didasari oleh latar belakang dan sejarah aktivitas FPI. FPI tidak jarang mengambil tindakan dengan sangat tegas sesuai teks Islam tanpa memberikan kondisi modernitas zaman (Hatta, 2017). Beberapa aktivis mengatakan gerakan-gerakan konservatis agama merupakan akibat dari gagalnya gagasan universalis untuk menciptakan dunia yang ideal. Konservatis bisa dikatakan merupakan cara hidup konvensional⁹ hingga konformis¹⁰.

Orang-orang konservatis memiliki penolakan terhadap suatu perubahan yang biasanya mereka bahasakan dengan "melestarikan/ melanggengkan" suatu

⁹ berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman).

¹⁰ suatu jenis pengaruh sosial saat individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

“kepercayaan” (Heywood, 2003). Kaum konservatif berusaha untuk melestarikan berbagai institusi seperti monarki, agama, pemerintahan parlementer, dan hak milik (*property right*), dengan tujuan menekankan stabilitas sosial dan kontinuitas. Lebih ekstremnya dari konservatis adalah reaksioner dimana mereka meninggalkan modernisme dan kembali ke “*the way things were*” atau kembali ke pondasi awal (McLean & McMillan, 2009). Kata konservatis lekat dengan makna negatif, dikarenakan sedikit banyak penganut konservatisme mampu menjelaskan dengan sangat tepat alasan mereka menentang nilai-nilai yang ada tersebut, terutama para konservatisme agama. Konservatisme di bagi menjadi beberapa kelompok antara lain konservatisme agama, fiskal, budaya dan sosial, nasional dan tradisional, dan sebagainya (Andersen & Taylor, 2006).

Seperti gerakan FPI, di Indonesia tidak sedikit kelompok masyarakat konservatis yang berbasis agama terutama Islam. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Kelompok Islam di Indonesia bahkan masih terbagi lagi menjadi berbagai aliran yang berbeda. Pembahasan pada penelitian ini fokus pada kelompok Islam Front Pembela Islam (FPI) dengan aliran Wahabisme–Salafi.

Sebenarnya penganut Wahabi tidak menyukai sebutan-sebutan yang selama ini lekat dengan Wahabisme. Penggunaan nama Wahabi maupun sebutan lainnya sebenarnya dianggap tidak sesuai dengan bagaimana ajaran dan gerakan mereka. Mereka lebih memilih menyebut aliran mereka dengan Salafi dan gerakan mereka dengan Salafiyah. Aliran Salafi memiliki

pendekatan puritan¹¹ untuk menjauhkan diri dari inovasi agama Islam (Wiktorowicz, 2006). Meskipun Salafi memiliki prespektif agama yang sama, namun terpecah akibat dari bagaimana sifat dasar mereka menerapkan keagamaan terhadap masalah dan isu baru. Cendekia harus menerapkan tidak hanya pengetahuan hukum Islam yang mendalam tapi juga pemahaman mengenai masalah atau isu-isu tertentu dengan baik. Meski Salafi membagi pendekatan yang sama tentang yurisprudensi keagamaan mereka sering memiliki interpretasi yang berbeda mengenai kondisi politik kontemporer (Wiktorowicz, 2006) .

Perbedaan dalam memahami hal-hal kontekstual membuat terpecahnya "komunitas" Salafi menjadi tiga faksi. Pertama *the purist* dimana menekankan pada metode pendekatan non-kekerasan, purifikasi, dan pendidikan. Kedua adalah *the politicians* menekankan pada penerapan kepercayaan Salafi pada ranah politik. Hal ini dilakukan karena ranah politik dianggap sangat berpengaruh pada keadilan sosial dan kekuasaan tunggal yang dipegang oleh Tuhan. Faksi ketiga adalah *the jihadis* yang posisinya lebih militan, menyerukan kekerasan dan revolusi (Wiktorowicz, 2006).

Melihat pada sikap yang dimiliki FPI selama ini, maka gerakan FPI masuk pada faksi kedua yaitu *the politicians*. Para anggota dan pendukung FPI tidak jarang mengusulkan hukum Islam untuk masuk dalam keputusan hukum dan sistem politik di Indonesia. Terbukti dengan FPI yang mewacanakan terbentuknya *Unitary State of Republic Indonesia* (NKRI Bersyariah) dengan hukum *syariah* atau hukum Islam. FPI percaya

¹¹ orang yang hidup saleh dan yang menganggap kemewahan dan kesenangan sebagai dosa.

bahwa hukum *syariah* cocok diterapkan di Indonesia. Bersama dengan FUI dan gerakan Islam lainnya mereka melakukan kampanye untuk memberlakukan regulasi-regulasi *syariah* di tiap daerah. Dengan begitu nantinya hukum *syariah* bisa dilaksanakan secara menyeluruh (Arifianto, 2017).

FPI mampu memobilisasi dukungan dari pemilih garis keras Islam dari latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda, mereka juga menarik simpati banyak politisi lokal dari kedua partai politik Islam dan sekuler. Mereka mengembangkan aliansi dengan kelompok tersebut dengan imbalan bantuan memberlakukan peraturan *syariah* lokal setelah mereka dipilih sebagai eksekutif lokal atau legislator (Arifianto, 2017). Buktinya adalah pada pengaturan yang dibuat antara FPI dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan selama kampanye pemilihan kembali 2013 sebagai gubernur Jawa Barat. Dia dipaksa untuk menariknya kembali setelah dipublikasikan oleh sejumlah laporan media massa. FPI terlibat lagi dalam kampanye untuk menggantikan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Cornelis yang seorang Kristen Dayak dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali pada 2018. Cornelis yang mengecam keras tindakan FPI di Jakarta kemudian melarang FPI beroperasi di provinsinya. Sebagai balasannya, FPI memiliki mendukung beberapa kandidat gubernur dengan kredibilitas yang saleh sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk memberlakukan peraturan Islam di provinsi Kalimantan Barat (Arifianto, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa FPI sebagai kelompok lokal mampu menegaskan nilai-nilai yang mereka percaya, mengumpulkan pendukung, dan juga menyebarkan wacananya. Kemudian hal tersebut

mampu mempengaruhi jalannya peradilan sehingga jatuh hukuman penjara untuk Ahok. Kemampuan FPI ini membuktikan bahwa *power of knowledge* memang ada dan begitu juga *counter discours*. FPI mampu membentuk *rezim of truthnya* sendiri bersama pendukungnya. Anggota FPI mampu melakukan *securitization* dengan *speech actnya* bahwa masalah pelecehan agama mampu merusak dan mendestabilisasi sosial di Indonesia. Oleh karena itu mereka mampu memobilisasi masa dan mendesak pemerintah untuk cepat memutuskan hukuman untuk Ahok.

D. Resistensi Norma Global dari Kekuatan Politik Domestik

Wacana globalis maupun konservatisme agama bisa dibidang memiliki posisi yang setara dalam langkah penyebaran gagasannya. Mengapa? Karena gagasan universal muncul dan berkembang dengan pesat dari Barat keseluruhan belahan bumi. Sama halnya dengan universalisme, dasar-dasar konservatisme agama–Islam–berasal dari tanah Arab yang kemudian mampu menyebar lintas negara/ transnasional dan mengglobal. Berbeda dengan keagamaan lainnya seperti Hindu yang berkembang dengan baik hanya di India (Nu'ad, 2016). Namun nyatanya wacana global kesulitan untuk benar-benar masuk di beberapa negara di dunia tak terkecuali di Indonesia.

Penyebaran gagasan-gagasan global, kedaulatan, kebebasan, hak, demokrasi dimulai dengan masa kolonisasi yang dilakukan Barat ke negara-negara sekitarnya hingga negara terjauhnya. Wacana kemanusiaan, hak asasi manusia masif dibicarakan setelah Perang Dunia dimana banyak korban berjatuh dan banyak diskriminasi terjadi. Wacana-wacana global kemudian masuk ke dalam kajian-kajian di sekolah-

sekolah dan di perguruan tinggi. Kemudian banyak bermunculan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berlandaskan kemanusiaan. Dimana mereka memberikan citra yang baik, dengan membantu sesama manusia keluar dari masalah yang mereka hadapi dari imbalan yang rendah hingga sama sekali tidak menerima imbalan. Banyak kemudian bermunculan yayasan amal yang bertarbelakang gagasan universal. Tidak jarang agenda-agenda pertemuan dengan mengundang para muda-mudi dari berbagai negara untuk “diperkenalkan” kepada gagasan-gagasan universal dilakukan. Meskipun penetrasi yang dilakukan oleh globalis begitu kuat nyatanya gagasan yang dibawa tidak luput dari pandangan negatif yang diberikan oleh kelompok konservatif terutama konservatis agama. Gagasan mengenai hak asasi manusia termasuk kesetaraan dan kebebasan menentukan sikap dianggap melampaui batasan norma. Mereka memandang bahwa gagasan universalis ini mengabaikan keberadaan Tuhan dan menyalahi kodrat-kodrat yang telah ada.

Salah satu bentrok gagasan antara global dan konservatis agama–Islam khususnya–yang paling kentara adalah *lesbian, gay, bisex, and transgender* (LGBT). Adu kebenaran antara LGBT dengan kelompok agama yang sering disebut *sex-straight* tidak pernah menemui titik terang. Bahkan perdebatan juga ada pada nilai-nilai demokrasi, dari tidak adanya diskriminasi pemimpin versus kaidah-kaidah memilih pemimpin berdasarkan Islam. Kemudian kebebasan berpendapat dengan menghormati ajaran agama lain, memisahkan urusan agama dengan politik berlawanan dengan menjalankan syariat agama dalam tiap sendi kehidupan. Benturan-benturan tersebut terjadi tidak hanya

melibatkan masyarakat saja atau pemerintah saja, namun keduanya.

Pada perdebatan LGBT dengan “*sex-straight*” globalis mendesak pengakuan dan “menghalalkan” LGBT di seluruh penjuru dunia sedangkan konservatis menganggap ini menyalahi kodrat Tuhan. Kaum globalis menginginkan penghapusan diskriminasi terhadap kaum LGBT termasuk pada hak penulisan jenis kelamin/ *sex* pada semua kartu/ surat identitas, pernikahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa LGBT merupakan hak tiap manusia untuk memilih bagaimana mereka menjalankan hidup terutama kaitannya dalam pemilihan *sex* dan dalam berpasangan. Sampai pada 2018, 24 negara mengizinkan adanya pernikahan sesama jenis negara-negara tersebut antara lain Argentina, Kanada, Irlandia, Malta, Afrika Selatan, dan Uruguay (AI Staff, t.thn.). Keinginan ini berlawanan dengan kaum konservatis, mereka berusaha meyakinkan diskursusnya dengan memberikan pernyataan melalui hadis maupun ilmiah. Konservatis Islam mengatakan bahwa dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa Tuhan membenci perilaku LGBT, mereka yang melakukan, serta pendukungnya bisa mendapatkan celaka yang berasal dari Tuhan. Hal tersebut tertulis dalam kitab suci umat Islam.

“Dan Nabi Lut (juga Kami utuskan). Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya “Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu?”. “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. Dan tiada jawaban oleh kaumnya melainkan mereka berkata “Usirlah

mereka (Nabi Lut dan pengikutnya yang taat) dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang(mendakwa) mensucikan diri. Maka Kami selamatkan dia dan ahlinya (keluarganya dan pengikutnya) melainkan isterinya, adalah dia tergolong dalam orang-orang yang dibinasakan. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu yang membinasakan). Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan". (Q.S Al-A'raf: 80-84)

Masih banyak pesan Tuhan melalui kitabNya yang membahas tentang larangan LGBT. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi mereka yang mematuhi dan celaka bagi mereka yang mendukung LGBT. Melalui ajaran ini konservatis Islam tidak mengizinkan LGBT untuk diakui karena menyalahi kodrat yang ada dan jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan (Yusof, Kadir, Ibrahim, Ahmad, & Noor, 2015). Bahkan penolakan terhadap LGBT juga disampaikan secara ilmiah oleh kaum konservatis. Kaum konservatis mengajukan gagasan bahwa kelangsungan terancam kelestariannya akibat dari LGBT. Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia (UII), Rosmelia mengatakan LGBT meningkatkan perilaku sex bebas yang artinya juga meningkatkan penyebaran penyakit mematikan HIV/ AIDS. Ini tentu akan mengganggu kelangsungan hidup generasi muda suatu bangsa (MI Administrator, 2018). Lebih dari itu hubungan yang dilakukan oleh sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan. Meski hal tersebut dibantah kembali oleh kaum LGB bahwa masalah ini selesai dengan donor sperma, sewa rahim/ kandungan, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, konservatis menggunakan isu keagamaan dan keTuhanan untuk melawan. Meskipun secara rasional dan ilmiah telah

dijelaskan rentetan akibat negatif yang muncul dari LGBT namun perkembangan LGBT tidak berhenti. Perdebatan gagasan kebebasan tidak hanya pada pemilihan gender namun juga kebebasan berpendapat yang menjadi masalah utama pada kasus Ahok.

Tuduhan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia dikemukakan oleh masyarakat global terhadap masyarakat lokal. Dari kebebasan berpendapat merambah sampai pada diskriminasi politik hingga kejahatan politik yang dilakukan elit-elit tertentu untuk menjatuhkan Ahok. Semua yang diajukan oleh masyarakat global merupakan nilai penting dalam demokrasi model Barat. Menurut masyarakat global yang mendukung demokrasi, tiap individu berhak untuk mencalonkan diri dalam pemerintahan dan juga berhak untuk dipilih, dengan menghilangkan diskriminasi atas keyakinan, etnis, gender, warna kulit, dan bentuk diskriminasi lainnya. Sehingga dengan dipermasalahkannya Ahok atas pendapatnya tentang agama Islam dianggap sebagai pelecehan terhadap asas demokrasi Barat. Bagi sebagian masyarakat Barat terutama mereka yang sangat pro demokrasi, tidak peduli latar belakang, agama, hingga warna kulit apabila orang tersebut dirasa mampu membawa negara untuk lebih maju dan berkembang maka ia akan didukung untuk menjadi pemimpin maupun bagian dari parlemen.

Sedangkan kubu konservatis tidak bisa menerima bentuk demokrasi Barat secara utuh. Ini dikarenakan dalam ajaran Islam penting untuk memilih pemimpin yang seiman atau berkeyakinan yang sama, yaitu Islam. Masalah pemilihan pemimpin Islam ini yang memicu kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Ahok tahun 2017.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Maidah: 51)

Dengan berlandaskan asas diatas, umat muslim harus memilih pemimpin mereka yang beragama Islam. Dengan negara mayoritas muslim masalah ini tidak bisa ditawar meskipun masyarakat global mengusik dengan mengajukan “tuduhan” praktik diskriminasi politik, diskriminasi kebebasan beragama. Masalah pelecehan agama terutama Islam menjadi masalah yang tidak jarang terjadi. Berbekal dengan hukum adat yang berlaku dan lagi adanya undang-undang mengenai pelecehan agama, sehingga tidak sulit untuk menyeret orang ke jalur hukum karena salah interpretasi. Kubu konservatis mengatakan bahwa penuntutan keadilan kepada Ahok merupakan bukti bahwa mereka benar-benar yang menjunjung Islam.

Kaum globalis sebagai pendukung Ahok mencari pembenaran lain dengan dengan mengatakan bahwa Ahok merupakan korban kejahatan politik di Indonesia. Mereka berargumen bahwa Ahok sebenarnya hanya mengalami *double-discrimination* dimana ia merupakan umat Kristiani dan ditambah merupakan keturunan Tionghoa. Kasus Ahok ini dianggap sebagai pijakan untuk elit tertentu melengserkan Ahok dari jabatannya, dan menghalangi supaya tidak bisa melanjutkan kiprahnya di dalam pemerintahan Indonesia. Mereka juga berargumen bahwa Ahok hanya korban dari orang-orang yang tidak sesuai dengan model kepemimpinannya,

pemberantasan korupsi yang sering dilakukan. Pendukung wacana global mengatakan bahwa isu ini diangkat dan didukung oleh mereka yang korup dan takut dilepas jabatannya oleh Ahok. Kaum globalis juga menambahkan isu pelecehan agama yang dilakukan Ahok ini terjadi pada masa panas, untuk pergantian gubernur Jakarta. Oleh karenanya *international society* lebih gencar lagi mempertanyakan apakah pembelaan agama Islam ini murni untuk membela Islam ataukah merupakan satu cara untuk melengserkan Ahok, atau apakah untuk melanggengkan dan membesarkan nama gerakan tertentu. Selain itu kaum globalis juga mengatakan bahwa setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya, termasuk Ahok. Apa yang diucapkan Ahok merupakan bentuk pengekangan dalam berpendapat, terlebih lagi isu ini muncul akibat dari rekayasa unggahan video oleh oknum tertentu.